DINAMIKA POLARISASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Reza Andrea Hasibuan
NPP. 33.0038
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: rezaandrea35@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP
Email: Lilis@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research examines the dynamics of political polarization in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Bireuen Regency, Aceh Province. Bireuen Regency was identified as an area with a high rate of attack news dissemination and internet penetration, the exploitation of religious figures (ulama) as political support tools, and various electoral integrity violations. The polarization not only affected the electoral democratic process but also had a significant impact on community social cohesion. Although there are studies on general electoral dynamics in Aceh, research that specifically examines political polarization in the context of the 2024 Pilkada in Bireuen is still very limited.* ***Purpose:*** *The purpose of this study is to analyze the dynamics of political polarization in the 2024 Pilkada in Bireuen Regency.* ***Method:*** *This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through semi-structured interviews with informants from Kesbangpol, Bawaslu, and the KPU of Bireuen Regency, as well as community members, selected via purposive and snowball sampling, supplemented by documentation and field observation. Data analysis applied the* (Miles, M. B. & Huberman, 1984) *model. The theoretical framework used is the Theory of Political Polarization* (McCoy & Somer, 2019)*, encompassing five dimensions: social identity, ideological and values, affective, institutional, and social cohesion.* ***Result:*** *The findings reveal three main results. First, polarization dynamics in Bireuen were shaped by kinship loyalties, the influence of ulama, and a clash of values between religiosity and the managerial competence of candidates, generating strong supporter fanaticism particularly in the digital sphere. Second, polarization had a serious impact on community social relations, manifested through deteriorating interpersonal relationships, declining social trust, verbal conflicts at the community level, and a threat to social cohesion. Third, the Bireuen Regency government, through the synergy of Kesbangpol, KPU, and Bawaslu, worked to minimize post-Pilkada polarization through institutional legitimacy strengthening, horizontal reconciliation via dialogue forums, and a role shift from regulator to mediator. However, all such efforts remained reactive and have yet to prioritize a preventive approach.* ***Conclusion:*** *Political polarization in the 2024 Pilkada in Bireuen Regency emerged from deeply rooted social identities, emotional attachments, and value clashes that extended beyond political*

competition into social life. The government needs to shift from a reactive to a preventive approach in managing polarization through sustainable political education programs, strengthened institutional transparency, and meaningful community reconciliation initiatives.

Keywords: *Political Identity; Political Polarization; Regional Head Election; Social Cohesion*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini mengkaji dinamika polarisasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Kabupaten Bireuen dipilih sebagai lokus penelitian karena teridentifikasi memiliki tingkat penyebaran berita serangan dan penetrasi internet yang tinggi, pemanfaatan tokoh agama (ulama) sebagai alat dukungan politik, serta mengalami berbagai kasus pelanggaran integritas pemilu. Polarisasi yang terjadi tidak hanya memengaruhi proses demokrasi elektoral, tetapi juga berdampak pada kohesi sosial masyarakat. Meskipun telah ada penelitian tentang dinamika pemilihan umum di Aceh, penelitian yang secara spesifik mengkaji polarisasi politik dalam konteks Pilkada di Kabupaten Bireuen masih sangat terbatas. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika polarisasi politik dalam pilkada 2024 di Kabupaten Bireuen. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan dari Kesbangpol, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Bireuen, serta masyarakat, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, didukung dokumentasi dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan model (Miles, M. B. & Huberman, 1984). Landasan teori yang digunakan adalah Teori Polarisasi Politik (McCoy & Somer, 2019) yang mencakup lima dimensi: identitas sosial, ideologis dan nilai, afektif, institusional, dan kohesi sosial. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, dinamika polarisasi di Bireuen terbentuk melalui perpaduan loyalitas kekerabatan, pengaruh ulama, serta benturan nilai antara religiusitas dan kompetensi manajerial kandidat, yang melahirkan fanatisme pendukung yang kuat terutama di ruang digital. Kedua, polarisasi berdampak serius pada hubungan sosial masyarakat berupa merenggangnya hubungan antarpribadi, menurunnya kepercayaan sosial, munculnya konflik verbal di tingkat komunitas, serta terancamnya kohesi sosial. Ketiga, pemerintah Kabupaten Bireuen melalui sinergi Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu berupaya meminimalisasi polarisasi pasca-Pilkada melalui penguatan legitimasi institusional, rekonsiliasi horizontal melalui forum dialog, serta pergeseran peran dari regulator menjadi mediator. Namun, seluruh upaya tersebut masih bersifat reaktif dan belum mengedepankan pendekatan preventif. **Kesimpulan:** Polarisasi politik dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Bireuen berakar dari identitas sosial yang kuat, keterikatan emosional, dan benturan nilai yang melampaui arena politik ke dalam kehidupan sosial. Pemerintah perlu beralih dari pendekatan reaktif menuju preventif melalui program pendidikan politik berkelanjutan, penguatan transparansi institusional, dan inisiatif rekonsiliasi komunitas yang bermakna.

Kata kunci: Identitas Politik; Kohesi Sosial; Pemilihan Kepala Daerah; Polarisasi Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata kedaulatan yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada langsung menghadapi berbagai permasalahan serius, salah satunya adalah polarisasi politik yang berpotensi merusak kohesi sosial masyarakat (Riyanti & Firmanto, 2025). Polarisasi politik merujuk pada perpecahan dan perbedaan yang sangat mencolok antara kelompok-kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan pilihan politik, keyakinan, dan pandangan terhadap isu-isu tertentu (Rianadiwa et al., 2024). Fenomena ini semakin mendapat perhatian serius, terutama dalam setiap kontestasi pemilihan. Polarisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan disharmoni sosial, merusak institusi demokrasi, dan mengancam ketahanan nasional.

Kabupaten Bireuen, salah satu daerah di Provinsi Aceh, menunjukkan dinamika polarisasi politik yang cukup kompleks dalam Pilkada 2024. Berdasarkan data Bawaslu RI, Provinsi Aceh termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat penetrasi internet dan penyebaran berita serangan yang tinggi. Di Kabupaten Bireuen, polarisasi ini tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga merambah ke akar rumput, memengaruhi hubungan antarwarga bahkan sampai ke tingkat keluarga dan komunitas. Pilkada 2024 di Kabupaten Bireuen diikuti tiga pasangan calon dengan latar belakang berbeda: Paslon 01 (Murdani Yusuf–Abdul Muhaimin) yang menonjolkan nilai religiusitas, Paslon 02 (Husaini M. Amin–Husaini Ilyas) yang bertumpu pada kekuatan partai lokal, dan Paslon 03 (Mukhlis–Razuardi) yang mengedepankan kompetensi teknis dan jaringan kekerabatan. Hasil akhir menunjukkan Paslon 03 meraih 55,59% suara, Paslon 01 meraih 32,24%, dan Paslon 02 hanya 12,17%. Distribusi suara ini mengindikasikan pembelahan preferensi elektoral yang tajam, senada dengan konsep pernicious polarization di mana masyarakat terbelah ke dalam dua kubu yang saling berhadapan (McCoy & Somer, 2019). Di Kabupaten Bireuen, beberapa kasus polarisasi terdokumentasi selama Pilkada 2024, antara lain: dugaan politik uang yang dilimpahkan ke Kejari, dugaan penyalahgunaan jabatan, persoalan rekrutmen panitia pemilihan dari orang terdekat pasangan calon yang bergulir ke Mahkamah Konstitusi, serta pemanfaatan ulama sebagai alat pendukung kandidat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada 2024 di Bireuen diwarnai oleh problematika integritas yang mempertajam polarisasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas polarisasi politik di Indonesia, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks nasional, peran media digital, penguatan partai politik, serta dampak polarisasi terhadap demokrasi secara umum. Penelitian terdahulu belum banyak menjelaskan bagaimana polarisasi politik terbentuk dan berkembang dalam kontestasi politik lokal yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas.

Terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang belum terjawab. Pertama, penelitian sebelumnya belum menjelaskan secara mendalam pengaruh loyalitas kekerabatan (kinship loyalty) sebagai faktor pembentuk identitas politik dan polarisasi pada masyarakat lokal. Kedua, kajian mengenai peran ulama lebih banyak ditempatkan sebagai aktor keagamaan, sementara pengaruhnya sebagai aktor politik yang mampu memobilisasi dukungan dan membentuk pembelahan sosial masyarakat masih relatif terbatas dibahas. Ketiga, penelitian terdahulu belum menghubungkan secara komprehensif antara pelanggaran integritas pemilu, seperti dugaan politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan persoalan netralitas penyelenggara, dengan munculnya polarisasi politik di tingkat masyarakat. Padahal, pelanggaran integritas pemilu dapat memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi dan memperbesar jarak sosial antar kelompok pendukung. Keempat, masih terbatas penelitian yang mengkaji polarisasi politik dalam konteks Pilkada lokal di Kabupaten Bireuen, yang memiliki karakteristik sosial berupa kuatnya hubungan kekerabatan, tingginya pengaruh ulama dalam kehidupan masyarakat, serta dominannya jaringan sosial berbasis komunitas gampong. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan mengingat polarisasi politik dalam Pilkada lokal, khususnya di Kabupaten Bireuen, berpotensi merusak kohesi sosial secara jangka panjang apabila tidak dipahami secara empiris. Tanpa adanya kajian yang spesifik dan mendalam mengenai dinamika polarisasi yang terjadi di tingkat lokal, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan basis data empiris yang memadai untuk merumuskan strategi penanganan yang tepat sasaran dan preventif, khususnya dalam mempertimbangkan faktor kekerabatan, pengaruh ulama, dan problematika integritas pemilu sebagai pemicu utama polarisasi. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka upaya pencegahan dan penanganan polarisasi berisiko berjalan tidak efektif, dan potensi disharmoni sosial pasca-Pilkada di Kabupaten Bireuen akan terus berulang tanpa penyelesaian yang sistematis.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas polarisasi politik di Indonesia. Penelitian (Rianadiwa et al., 2024) mengenai *Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024* menemukan bahwa polarisasi politik dapat mengancam stabilitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai dan literasi digital masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya peran pemerintah, media, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran disinformasi yang dapat memperkuat pembelahan politik. Namun penelitian ini belum mengkaji faktor-faktor lokal yang memengaruhi munculnya polarisasi politik di tingkat daerah.

Penelitian (Efrianti, 2025) mengenai *Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam Pemberitaan Media Online* menunjukkan bahwa media online memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi politik masyarakat. Pemberitaan yang cenderung partisan dapat memperkuat identitas kelompok dan meningkatkan sentimen negatif terhadap kelompok politik lain. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa media digital

menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat polarisasi politik. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek media dan belum mengkaji keterkaitannya dengan faktor sosial budaya masyarakat lokal seperti hubungan kekerabatan dan pengaruh tokoh agama.

Penelitian (Susilawati, 2023) mengenai *Penguatan Fungsi Partai Politik sebagai Pencegahan Polarisasi Politik pada Masa Pemilu 2024* menemukan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menjaga stabilitas demokrasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi partai politik dapat menjadi instrumen untuk meredam polarisasi politik. Namun demikian, penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana kondisi ketika fungsi partai politik tidak berjalan secara optimal dalam konteks politik lokal sehingga mitigasi polarisasi harus dilakukan oleh aktor lain di luar partai politik.

Penelitian (Zahro & Saputri, 2024) mengenai *Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024* menemukan bahwa perbedaan pilihan politik dapat memunculkan fragmentasi sosial di lingkungan pesantren. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tokoh agama memiliki peran yang besar dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada lingkungan pesantren sehingga belum menjelaskan bagaimana pengaruh ulama dapat membentuk polarisasi politik pada masyarakat yang lebih luas di tingkat kabupaten.

Penelitian (Nashrullah, 2023) mengenai *Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Kajian Sosiologi Hukum* menemukan bahwa polarisasi politik dapat mengganggu kohesi sosial dan menciptakan konflik horizontal di masyarakat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa polarisasi tidak hanya berdampak pada proses politik, tetapi juga pada hubungan sosial antar kelompok masyarakat. Namun penelitian ini masih melihat fenomena polarisasi dari perspektif makro dan belum mengkaji secara spesifik faktor-faktor lokal yang menyebabkan polarisasi politik dalam kontestasi Pilkada

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai polarisasi politik telah banyak dilakukan, baik yang membahas peran media digital, fungsi partai politik, pengaruh tokoh agama, maupun dampaknya terhadap demokrasi dan kohesi sosial. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika polarisasi politik dalam Pilkada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 masih sangat terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis keterkaitan antara loyalitas kekerabatan, pengaruh ulama, pelanggaran integritas pemilu, dan lemahnya fungsi partai politik sebagai faktor pembentuk polarisasi politik lokal. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah sebagai studi kasus empiris yang menerapkan Teori Polarisasi Politik (McCoy & Somer, 2019) untuk menganalisis dinamika polarisasi politik pada Pilkada Kabupaten Bireuen Tahun 2024 serta dampaknya terhadap kohesi sosial masyarakat.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menemukan bahwa polarisasi politik di Kabupaten Bireuen tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan pilihan politik atau ideologi, tetapi terbentuk melalui interaksi tiga faktor utama, yaitu loyalitas kekerabatan, pengaruh ulama, dan rendahnya efektivitas partai politik dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Ketiga faktor tersebut membentuk pola polarisasi yang berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan peran media, ideologi, maupun identitas politik formal.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa ulama tidak hanya berfungsi sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga berperan sebagai aktor politik informal yang mampu memobilisasi dukungan dan memengaruhi pembentukan identitas kelompok politik di tingkat masyarakat. Temuan ini memperluas kajian polarisasi politik lokal dengan menempatkan ulama sebagai variabel penting dalam proses pembentukan dan mitigasi polarisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik menyebabkan proses mitigasi polarisasi lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu. Temuan tersebut memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian polarisasi politik lokal, khususnya dalam menjelaskan pergeseran aktor mitigasi polarisasi dari partai politik kepada lembaga pemerintahan dan penyelenggara pemilu.

1.6 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dinamika polarisasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika polarisasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali lebih dalam atas fenomena polarisasi politik yang melibatkan interaksi sosial dan persepsi subjektif berbagai aktor. Sebagaimana ditegaskan oleh (Simangunsong, 2017), penelitian pemerintahan dengan metode kualitatif berfungsi untuk memahami dinamika sosiopolitik secara utuh, mengeksplorasi hubungan antar-aktor, serta memetakan bagaimana kebijakan atau kontestasi berdampak langsung pada struktur kemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan informan utama yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Teknik *purposive sampling* digunakan karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, teknik snowball sampling dengan melakukan wawancara bersama informan awal, peneliti meminta rekomendasi mengenai pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara langsung dampak polarisasi politik di tingkat masyarakat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, diperoleh lima orang perwakilan

masyarakat yang berasal dari Kecamatan Kota Juang dan wilayah lain yang mengalami dinamika politik selama Pilkada 2024.

Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti menemukan pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau terdampak oleh fenomena polarisasi politik selama Pilkada 2024 di Kabupaten Bireuen. Melalui kombinasi kedua teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian. Informan terdiri dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Bireuen, dan lima perwakilan masyarakat.

Informan kunci *(key informant)* dalam penelitian ini yaitu Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen yang memberikan informasi mengenai kondisi politik daerah, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, serta strategi penanganan polarisasi pasca-Pilkada. Pemilihan informan kunci tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam menjaga stabilitas politik, memfasilitasi pendidikan politik masyarakat, serta melakukan pembinaan kehidupan politik dan demokrasi di daerah. Oleh karena itu, Plt. Kepala Bakesbangpol dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang komprehensif mengenai dinamika polarisasi politik yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen.

Informan utama terdiri atas Ketua KPU Kabupaten Bireuen dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bireuen. Kedua informan ini memberikan data mengenai pelaksanaan Pilkada, dinamika kontestasi politik, bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, tingkat partisipasi politik masyarakat, serta upaya menjaga integritas dan legitimasi proses pemilihan. Kemudian Informan pendukung terdiri atas lima orang perwakilan masyarakat yang berasal dari latar belakang sosial dan preferensi politik yang berbeda. Informan ini berperan memberikan data mengenai pengalaman langsung masyarakat dalam menghadapi polarisasi politik, pengaruh kekerabatan dan ulama terhadap pilihan politik, serta dampak polarisasi terhadap hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Informan tambahan dipilih dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas politik lokal, pengalaman langsung menghadapi polarisasi politik, serta kemampuan memberikan informasi mengenai pengaruh kekerabatan, peran ulama, dan hubungan sosial pasca-Pilkada. Proses penambahan informan dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai menunjukkan pola yang sama dan tidak ditemukan data baru yang signifikan *(data saturation),* sehingga data penelitian dianggap telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi, publikasi, laporan, dan peraturan terkait. Analisis data menggunakan model (Miles, M. B. & Huberman, 1984) yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (memilih dan menyederhanakan data), penyajian data (dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan), dan penarikan kesimpulan (menjawab rumusan masalah secara terverifikasi).

Kerangka analisis menggunakan Teori Polarisasi Politik dari (McCoy & Somer, 2019) yang mencakup lima dimensi: (1) identitas sosial, yang menjelaskan bagaimana identitas kekerabatan, keagamaan, dan partai membentuk preferensi politik; (2) ideologis dan nilai, yang berkaitan dengan perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan dan moralitas kandidat; (3) afektif (emosional), yang menyoroti sentimen negatif dan fanatisme antarkelompok; (4) institusional, yang menggambarkan peran lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga netralitas; dan (5) kohesi sosial, yang melihat dampak polarisasi terhadap persatuan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan Januari Tahun 2026, yang mencakup proses pelaksanaan wawancara secara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan fenomena dinamika polarisasi politik di Kabupaten Bireuen secara mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan menggunakan Teori Polarisasi Politik (McCoy & Somer, 2019) berdasarkan data wawancara dengan Plt. Kepala Bakesbangpol, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Bireuen, dan perwakilan masyarakat. Hasil penelitian disajikan dalam tiga bagian: dinamika polarisasi, dampak sosial, dan upaya pemerintah.

3.1 Dimensi Identitas Sosial

Dinamika polarisasi politik dalam Pilkada 2024 di Bireuen tidak dapat dilepaskan dari identitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bakesbangpol, selama Pilkada muncul berbagai kelompok pendukung yang terbentuk berdasarkan kedekatan kekerabatan, afiliasi partai, maupun kedekatan dengan tokoh agama setempat. Kelompok-kelompok ini cukup solid dan terorganisir, terutama di tingkat gampong.

Terdapat tiga bentuk identitas sosial yang dominan membentuk polarisasi. Pertama, identitas kekerabatan merupakan faktor paling dominan, di mana masyarakat cenderung memberikan dukungan kepada kandidat yang memiliki hubungan darah atau kedekatan sosial. Pilihan politik keluarga sering kali dianggap sebagai keputusan kolektif yang wajib dijaga, memperkuat terbentuknya kelompok pendukung yang eksklusif. Kedua, identitas keagamaan berperan signifikan karena masyarakat cenderung mengikuti arah dukungan tokoh agama yang dianggap memiliki legitimasi moral. Sebagaimana disampaikan masyarakat Kecamatan Kota Juang: "Kami biasanya melihat juga siapa yang didukung oleh ulama. Karena kami percaya ulama pasti memilih yang terbaik untuk masyarakat". Ketiga, identitas politik dan loyalitas partai membentuk pola dukungan yang kaku, di mana masyarakat sulit berpindah pilihan meskipun terdapat alternatif kandidat lain yang lebih unggul secara program.

Kombinasi ketiga bentuk identitas sosial ini menciptakan basis pendukung yang solid namun eksklusif, memperkuat polarisasi dan mempersempit ruang dialog antarkelompok. Menurut (Labolo, 2015) gejala pemerintahan dan kontestasi politik tidak

dapat dilepaskan dari dinamika sosiologis di sekitarnya. Ketika institusi pemilu berinteraksi dengan ikatan kekerabatan dan kepatuhan terhadap otoritas keagamaan yang mengakar, kontestasi tersebut dengan mudah mengonstruksi segregasi sosial dan mempercepat terbentuknya polarisasi di tingkat akar rumput.

Hal ini menunjukkan bahwa identitas sosial dalam Pilkada Bireuen tidak lagi berfungsi sebagai identitas sosial biasa, tetapi telah berkembang menjadi identitas politik yang bersifat eksklusif. Menurut (McCoy & Somer, 2019) polarisasi terjadi ketika identitas kelompok menjadi lebih dominan dibandingkan identitas kewargaan yang lebih luas. Kondisi tersebut terlihat di Kabupaten Bireuen ketika loyalitas terhadap keluarga, kelompok pendukung, dan ulama lebih menentukan pilihan politik dibandingkan pertimbangan program kandidat. Dengan demikian, identitas sosial telah menjadi fondasi utama terbentuknya polarisasi politik lokal.

3.2 Dimensi Ideologis dan Nilai

Dimensi ini berkaitan dengan perbedaan pandangan mendasar terhadap kepemimpinan dan nilai yang dianut masyarakat dalam memilih calon kepala daerah. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Bireuen, ekspresi perbedaan ideologis paling banyak muncul melalui penyebaran konten di media sosial yang mempertentangkan nilai religiusitas dengan kemampuan manajerial kandidat. Ada kelompok yang menekankan pemimpin harus dari kalangan yang paham agama, sementara kelompok lain lebih menekankan kompetensi teknis. Perdebatan ini tidak jarang berkembang menjadi saling menyerang di ruang digital.

Nilai-nilai yang dianut masyarakat bertindak sebagai pisau bermata dua: sebagai dasar pembenaran dalam memilih pemimpin, namun juga sebagai motor penggerak polarisasi. Ketika perbedaan persepsi terhadap moralitas dan kompetensi kandidat tidak lagi menemui titik temu, ruang publik cenderung terjebak dalam debat kaku dan aksi saling menyerang. Hal ini memperkuat pola *pernicious polarization* karena perbedaan nilai tidak dikelola melalui mekanisme dialog yang sehat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perdebatan antara nilai religiusitas dan kompetensi kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai perbedaan preferensi politik yang wajar, melainkan sebagai pertarungan antara dua kelompok yang saling mengklaim memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi. Kondisi ini memperkuat pembelahan politik di masyarakat.

3.3 Dimensi Afektif (Emosional)

Dimensi afektif menyoroti aspek perasaan dan keterikatan psikologis terhadap kandidat maupun isu-isu yang berkembang selama Pilkada. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu: "Banyak gesekan yang terjadi bukan karena perbedaan program, tetapi karena emosi pendukung yang terlalu fanatik terhadap kandidatnya. Tantangan kami adalah meredam potensi konflik yang dipicu oleh emosi, terutama di media sosial dan saat kampanye berlangsung". Penelitian (Cassidy et al., 2026) menemukan bahwa afiliasi politik dan persepsi ancaman terhadap kelompok politik lain memengaruhi tingkat kepercayaan individu dalam interaksi sehari-hari. Semakin tinggi ancaman yang dirasakan

terhadap kelompok politik lawan, semakin rendah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada anggota kelompok tersebut.

Keterikatan emosional ini mendorong masyarakat untuk menilai kandidat bukan berdasarkan kemampuan atau kebijakan, melainkan berdasarkan kedekatan emosional dan sentimen kelompok. Sejalan dengan temuan (Esau et al., 2025), komunikasi digital yang tidak terkendali dapat memicu polarisasi destruktif (*destructive polarization*) yang berujung pada runtuhnya kepercayaan sosial (*breakdown of social trust*) di tingkat masyarakat. Kemudian, Polarisasi afektif cenderung lebih sulit dikendalikan karena berkaitan dengan loyalitas dan identitas diri. Di Kabupaten Bireuen, tingginya penetrasi internet memperparah kondisi ini karena konten-konten bermuatan SARA dan serangan dapat tersebar luas dengan cepat, semakin mempertajam sentimen antarkelompok.

Polarisasi afektif ditandai dengan meningkatnya sentimen negatif terhadap kelompok lawan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak hanya memberikan dukungan kepada kandidat pilihannya, tetapi juga menunjukkan sikap antipati terhadap kelompok pendukung kandidat lain. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa polarisasi di Kabupaten Bireuen telah bergerak dari perbedaan pilihan politik menuju keterikatan emosional yang kuat terhadap identitas kelompok.

3.4 Dimensi Institusional

Dimensi institusional menggambarkan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu, pengawas, dan pemerintah daerah berperan dalam menjaga netralitas dan mengelola potensi konflik. Ketua KPU Kabupaten Bireuen menyatakan: "Kami berupaya memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat percaya bahwa proses ini berlangsung secara jujur dan adil. Ketika kepercayaan publik terjaga, maka perbedaan pilihan tidak akan berkembang menjadi konflik yang merusak."

Bawaslu melakukan pengawasan intensif terhadap kampanye negatif dan penyebaran informasi yang tidak benar. Sementara itu, Kesbangpol menjalankan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Meskipun demikian, terdapat temuan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap netralitas KIP sempat memuncak ketika dugaan rekrutmen panitia pemilihan dari kalangan orang terdekat pasangan calon bergulir ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini mengonfirmasi temuan (McCoy & Somer, 2019) bahwa ketika polarisasi meningkat, lembaga yang seharusnya netral justru menjadi sasaran tuduhan keberpihakan.

Meningkatnya polarisasi dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran integritas pemilu dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu memunculkan keraguan sebagian masyarakat terhadap netralitas institusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak hanya memengaruhi hubungan antar masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi institusi demokrasi lokal.

3.5 Dimensi Kohesi Sosial

Polarisasi politik yang terjadi selama Pilkada 2024 berdampak langsung pada kohesi sosial masyarakat Bireuen. Sebagaimana diungkapkan informan masyarakat Kecamatan Kota Juang: "Dulu kami sering berkumpul tanpa masalah, tapi setelah Pilkada kemarin, kalau sudah beda pilihan menjadi lebih canggung. Kadang pembicaraan politik membuat suasana tidak nyaman."

Jarak sosial antarindividu dengan preferensi politik berbeda terbentuk bahkan berlanjut hingga pasca pilkada. Namun demikian, nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan kesadaran kolektif masyarakat masih berfungsi sebagai faktor penyeimbang yang mampu menjaga kohesi sosial tetap terjaga. Kegiatan bersama seperti gotong royong dan kenduri menjadi media pemulihan hubungan yang organik, sejalan dengan karakter masyarakat Bireuen yang masih mengedepankan nilai musyawarah dan kekeluargaan.

Dampak paling serius dari polarisasi politik adalah menurunnya kohesi sosial akibat menguatnya batas sosial antar kelompok. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan pilihan politik menyebabkan munculnya jarak sosial, berkurangnya interaksi, dan menurunnya kepercayaan antarwarga. Meskipun demikian, keberadaan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong masih menjadi mekanisme sosial yang mampu mencegah polarisasi berkembang menjadi konflik terbuka di Kabupaten Bireuen.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa polarisasi politik di Kabupaten Bireuen pada Pilkada 2024 telah melampaui batas perbedaan pilihan politik dan merasuk ke dalam dimensi sosial yang sangat personal. Demokrasi lokal pada dasarnya tidak boleh dilepaskan dari koridor kesatuan, di mana pelaksanaan roda demokrasi yang tanpa diimbangi oleh penguatan wawasan kebangsaan justru akan membuat sistem tersebut berjalan tidak optimal (Rowa, 2015). Fenomena ini mengonfirmasi terjadinya *pernicious polarization* (McCoy & Somer, 2019), di mana persaingan politik bertransformasi menjadi konflik identitas yang merusak hubungan antarpribadi, merenggangkan ikatan kekerabatan, dan menurunkan tingkat kepercayaan sosial akibat maraknya disinformasi serta isu SARA. Berbeda dengan penelitian (Rianadiwa et al., 2024) yang menyatakan polarisasi digerakkan oleh konflik ideologi partai politik skala makro-nasional, temuan di Bireuen menunjukkan polarisasi sosiologis lokal yang justru dipicu oleh benturan loyalitas kekerabatan (*kinship*) dan mobilisasi emosional oleh figur ulama. Sama halnya dengan temuan (Efrianti, 2025) mengenai peran media digital sebagai akselerator pembelahan, penelitian ini membuktikan bahwa penetrasi internet dan grup media sosial (WhatsApp/Facebook) di Bireuen menjadi sarana masif penyebaran hoaks dan berita serangan yang mengunci fanatisme pendukung. Berbeda dengan gagasan (Susilawati, 2023) yang menempatkan fungsi internal parpol sebagai peredam utama pembelahan publik, parpol di Bireuen justru pasif dalam edukasi politik. Akibatnya, beban mitigasi sisa polarisasi sepenuhnya bergeser ke instansi pemerintah (Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu). Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas kajian (Zahro & Saputri, 2024). Jika mereka membatasi dampak polarisasi agama hanya di internal pesantren, temuan di Bireuen membuktikan fragmentasi dukungan

ulama meluas hingga membelah masyarakat secara horizontal di tingkat gampong (desa). Temuan ini juga memperkuat penelitian (Nashrullah, 2023)bahwa polarisasi memicu disharmoni sosiopolitik. Di Bireuen, Pilkada 2024 terbukti merusak modal sosial warga gampong yang ditandai dengan renggangnya hubungan keluarga, konflik verbal, dan merosotnya rasa saling percaya (*social trust*). Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep *pernicious polarization* dari (McCoy & Somer, 2019) mengenai pembelahan biner (dua kutub yang saling berhadapan) yang merembes ke ranah sosial. Namun, penelitian ini memberikan catatan kritis bahwa strategi penanganan oleh Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu Bireuen masih bersifat reaktif pasca-konflik, belum preventif.

Hasil penelitian (Afrimadona, 2021) juga menunjukkan bahwa polarisasi politik di Jakarta terjadi terutama pada isu sosial-keagamaan, di mana afiliasi politik berpengaruh terhadap perbedaan pandangan masyarakat mengenai peran agama dalam politik. Fenomena ketajaman polarisasi akibat benturan nilai ini pada dasarnya memperlihatkan terjadinya distorsi terhadap esensi kontestasi lokal. Sebagaimana ditegaskan oleh (Ilham et al., 2023), hakikat politik sejatinya adalah mekanisme untuk mendamaikan perbedaan di antara kelompok masyarakat guna mencapai keputusan kolektif. Namun, ketika pembelahan sosial justru menguat di tingkat akar rumput, fungsi politik sebagai ruang rekonsiliasi horizontal berubah menjadi pemicu keretakan yang mengikis kohesi warga gampong. Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan kekeluargaan masih berfungsi sebagai faktor pemulih, seluruh upaya pemerintah masih bersifat reaktif dan belum memiliki kerangka preventif yang sistematis dan berkelanjutan.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis mendapatkan temuan dampak polarisasi yang digerakkan oleh dimensi identitas sosial dan afektif melahirkan dampak yang melampaui arena politik elektoral. Pertama, terjadi merenggangnya hubungan antarpribadi dan keluarga akibat kuatnya tekanan ikatan kekerabatan di Bireuen saat terjadi perbedaan pilihan. Kedua, terjadi penurunan tingkat kepercayaan sosial yang diperparah oleh masifnya disinformasi dan hoaks SARA di grup WhatsApp serta Facebook. Menurut (Iyengar et al., 2012) polarisasi yang berbasis identitas sosial berpotensi memperlemah hubungan antarkelompok dalam masyarakat karena perbedaan politik dipersepsikan sebagai perbedaan identitas yang mendasar. Ketiga, muncul konflik verbal dan pengucilan di tingkat gampong karena keterbelahan jemaah akibat perbedaan rekomendasi politik dari para ulama. Hal ini secara langsung melemahkan modal sosial organik seperti tradisi gotong royong dan kenduri. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi polarisasi politik di Kabupaten Bireuen seperti kuatnya patronase politik lokal, pengaruh media sosial berbasis grup tertutup, legitimasi ulama sebagai opinion leader, budaya politik patron-klien, rendahnya literasi politik digital masyarakat, serta tingginya sensitivitas identitas sosial dalam kontestasi politik lokal.

Untuk meredam dampak sisa-sisa polarisasi pasca-Pilkada tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui sinergi Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu menjalankan beberapa upaya strategi. Langkah awal bertumpu pada penguatan legitimasi institusional melalui transparansi hasil penghitungan untuk menurunkan tensi politik. Selanjutnya, Kesbangpol

memfasilitasi rekonsiliasi horizontal melalui forum dialog yang mempertemukan eks-tim sukses, tokoh adat, dan ulama. Bawaslu tetap mengawasi konten provokatif di media sosial, sementara Kesbangpol melakukan pembinaan etika politik. Menariknya, pemerintah melakukan pergeseran peran dari regulator menjadi mediator dengan merangkul ulama sebagai agen perdamaian. Langkah mediasi ini sejalan dengan konsep kepemimpinan kepamongprajaan menurut (Wasistiono, 2022) yang menegaskan bahwa fungsi utama pamong praja adalah mengedepankan watak mengayomi dan mendamaikan kelompok-kelompok yang berselisih. Meskipun demikian, seluruh upaya tersebut masih bersifat reaktif dan belum mengedepankan pendekatan preventif yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika polarisasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen terbentuk melalui perpaduan loyalitas kekerabatan, pengaruh ulama, serta benturan nilai antara religiusitas dan kompetensi manajerial kandidat yang melahirkan fanatisme pendukung dan mempertegas pembelahan sosial yang terus berlanjut hingga pasca pilkada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam hal ruang lingkup analisis, kajian mengenai strategi penanganan polarisasi oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen (Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu) masih terbatas pada evaluasi terhadap langkah-langkah yang bersifat reaktif pasca-Pilkada

Arah Masa Depan Penelitian *(Future Work)*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektivitas desain program pendidikan politik berkelanjutan berbasis komunitas hingga tingkat desa secara terstruktur guna menjaga ketahanan kohesi sosial pasca-kontestasi politik lokal.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP selaku dosen pembimbing yang telah dengan tulus hati dan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam proses penelitian ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Plt. Kepala Bakesbangpol Ibu Nurhayati, Ketua Bawaslu Bapak Rahmad, dan Ketua KPU Bapak Saiful Hadi Kabupaten Bireuen yang telah memberikan data dan informasi yang sangat membantu. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh perwakilan masyarakat yang telah berperan sebagai informan. Semoga temuan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam upaya meminimalisasi polarisasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afrimadona. (2021). Revisiting political polarization in Indonesia: A case study of Jakarta's electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *40*(2), 315–339. https://doi.org/10.1177/18681034211007490

Cassidy, B. S., Rasool, J., Smitherman, I. W., Park, B. K., & Seaman, K. L. (2026). Political partisanship and perceived partisan threat relate to simple trust decisions. *Cognitive Research: Principles and Implications*, *11*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s41235-

025-00698-3

Efrianti, Y. (2025). Polarisasi politik Indonesia tahun 2024 dalam pemberitaan media online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, *3*(1), 74–91. https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869

Esau, K., Choucair, T., Vilkins, S., Svegaard, S. F. K., Bruns, A., O'Connor-Farfan, K. S., & Lubicz-Zaorski, C. (2025). Destructive polarization in digital communication contexts: a critical review and conceptual framework. *Information Communication & Society*, *28*(8), 1499–1520. https://doi.org/10.1080/1369118X.2024.2413127

Ilham, T., Rahman, H., Yul, F., Marta, D., Teresa, M., Nangameka, I., Putra, A., & Amane, O. (2023). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, not ideology. *Public Opinion Quarterly*, *76*(3), 405–431. https://doi.org/10.1093/poq/nfs038

Labolo, M. (2015). *Dinamika politik dan pemerintahan lokal*. Ghalia Indonesia.

McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a theory of pernicious polarization and how It harms democracies: Comparative evidence and possible remedies. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *681*(01), 234–271. https://doi.org/10.1177/0002716218818782

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods* (1st ed.). Sage Publications. https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf

Nashrullah, J. (2023). Polarisasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam kajian sosiologi hukum. *Realism: Law Review*, *1*(2), 20–38. https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15

Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Salam, V. T., & Rahmawati, N. (2024). Upaya pencegahan polarisasi politik di tahun pemilu 2024. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, *4*(01), 169–179. https://doi.org/10.26593/jsh.v4i01.7548

Riyanti, R., & Firmanto, F. (2025). Pemilihan kepala daerah melalui pemilihan DPRD berbasis demokrasi perwakilan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(01), 3946–3953. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2227

Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*. IPDN.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Susilawati, Y. (2023). Penguatan fungsi partai politik sebagai pencegahan polarisasi partai politik pada masa pemilu 2024. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, *2*(2), 110–123. https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527

Wasistiono, S. (2022). *Kepemimpinan pemerintahan dan kepamongprajaan*. Sketsa Media.

Zahro, F., & Saputri, F. I. (2024). Polarisasi politik di lingkungan pondok pesantren dalam pemilihan umum 2024. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *4*(01), 21–36. https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8663